

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan I 2024 tercatat mengalami inflasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, walaupun masih berada di sekitar rentang target sasaran inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$. Realisasi inflasi Kaltim triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,03% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,95% (yoy).

Secara spasial, peningkatan inflasi di Kaltim pada periode ini didorong oleh peningkatan inflasi di 4 daerah IHK yaitu Kab.Berau, Kab.PPU, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan dengan peningkatan lebih tinggi terjadi di kab. Berau. Pada triwulan ini, Kab Berau mengalami inflasi 4,05% (yoy), menyusul Kab. PPU yang mengalami inflasi 3,18% (yoy).

Adapun Kota Samarinda dan Balikpapan tercatat mengalami inflasi namun cukup terkendali.

Komoditas penyumbang inflasi Kaltim secara yoy pada triwulan I Tahun 2024 adalah Beras, Sigarek Kretek Mesin (SKM), Tomat, ikan layang/Ikan benggol dan Bawang putih.

Laju inflasi yang lebih tinggi pada triwulan I 2024 terutama disebabkan oleh peningkatan permintaan komoditas pangan menjelang HBKN di tengah pasokan beberapa komoditas yang belum masuk masa panen terutama pada komoditas beras.

KABUPATEN/KOTA	INFLASI yoy (%)	INFLASI mtm (%)
Kabupaten Berau	4,05	0,22
Kabupaten Penajam Paser Utara	3,18	0,24
Kota Balikpapan	2,95	0,47
Kota Samarinda	2,84	0,29
Provinsi Kalimantan Timur	3,03	0,34

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Bahwa terdapat potensi inflasi di triwulan I 2024 akibat momen HBKN, sehingga perlu diwaspadai **terjadinya kenaikan harga secara umum** pada momen menjelang bulan Ramadhan, yang ditunjukkan dari data historis perkembangan inflasi bahwa pada **momen Ramadhan selalu terjadi inflasi**.

Beberapa komoditas berpotensi memberikan andil terhadap inflasi umum, diantaranya adalah komoditas pangan, yaitu **daging ayam ras, minyak goreng, beras, ayam hidup, daging sapi, telur ayam ras, dan gula pasir**.

Cukup tingginya inflasi di Kabupaten Berau dan Penajam Paser Utara yang tahun 2024 ini baru ditetapkan menjadi kabupaten yang dihitung nilai IHKnya.

Data ketersediaan pasokan komoditi bahan pangan di Provinsi Kalimantan Timur saat ini diperkirakan cukup hingga tiga bulan ke depan, akan tetapi tradisi yang terjadi setiap menjelang Hari Besar Keagamaan, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Mengingat Kalimantan Timur bukan merupakan daerah penghasil atau daerah produksi maka ketergantungan terhadap daerah lain menjadi sangat tinggi terutama kepada Jawa Timur dan Sulawesi

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Prov Kaltim antara lain:

- Melakukan penguatan koordinasi TPID se-Kaltim melalui kegiatan Capacity Building dan rapat koordinasi (HLM)
- Membentuk sistem peringatan dini (early warning system) pengendalian inflasi dengan memanfaatkan data perkembangan harga di Laminetam.id
- Membentuk toko penyeimbang (kios sigap) di Pasar Segiri Samarinda dengan mengoptimalkan peran perusda PT Kaltim MBS
- Melaksanakan Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar
- Komitmen Kerja sama Optimalisasi Penguatan Rantai Pasok antar Daerah regional Kalimantan
- Komunikasi efektif dengan kampanye belanja bijak melalui kegiatan Ulama Peduli Inflasi
- Pemantauan Stok dan Harga Pangan di Pasar Tradisional dan Pasar Modern
- dst

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam kerangka 4K, **Keterjangkauan Harga** :

1. Optimalisasi Toko Penyeimbang (Kios SIGAP) serta perluasan ke seluruh Kota//Kabupaten IHK di Kaltim (termasuk penggunaan dana BTT untuk pengendalian harga / inflasi)
2. Operasi Pasar dan/atau Gerakan Pangan Murah untuk komoditas pangan strategis (terutama beras, termasuk beras premium dengan mekanisme *community based*)
3. Sidak Pasar dan Distributor khususnya komoditas pangan strategis
4. Mendorong penambahan frekuensi penerbangan

Ketersediaan Pasokan :

1. Optimalisasi peran BUMD sebagai penyangga pangan melalui perluasan KAD dengan daerah sentra produksi
2. Penyaluran alsintan dan saprotan (termasuk pemetaan kebutuhan pompa/pipanisasi untuk wilayah produksi yang memerlukan) untuk mendorong peningkatan dan efisiensi produksi
3. Menggalakkan program tanam pekarangan dan lahan marginal
4. Penyediaan/pemanfaatan *cold storage* untuk produk hortikultura
5. Meningkatkan pengadaan cadangan pangan provinsi

Kelancaran Distribusi :

1. Subsidi ongkos angkut untuk penyediaan bapokting
2. Penguatan dan pemantauan kuota BBM di SPBU khususnya solar untuk angkutan umum
3. Penyiapan pergudangan / distribution centre dan sistem informasi keluar masuk logistik barang di pasar induk

Komunikasi yang Efektif :

1. Himbauan belanja bijak dan tidak *panic buying* kepada masyarakat termasuk program Ulama Peduli Inflasi
 2. Meningkatkan publikasi toko penyeimbang kepada masyarakat
 3. Diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal
 4. Sosialisasi produk turunan cabai rawit
 5. Pemanfaatan EWS & penambahan pemantauan komoditas di Lamin Etam
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan untuk pengendalian inflasi mendatang adalah :

- Meningkatkan koordinasi di masing-masing daerah melalui *high level meeting* untuk menyusun strategi pengendalian inflasi
- Penguatan kelembagaan TPID di masing-masing kabupaten/kota terutama untuk kabupaten/kota IHK
- Memanfaatkan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi, termasuk mendorong pembentukan kios penyeimbang
- Melakukan pemantauan harga dan mitigasi kenaikan harga pangan dengan memanfaatkan data *HeatMap dan Proyeksi Inflasi Early Warning System* sebagai bahan rekomendasi pengendalian inflasi
- Fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas dan pembangunan sarana pangan untuk komoditas pokok dan penyumbang inflasi tinggi.
- Menyiapkan pembentukan toko-toko penyeimbang khususnya di Kabupaten/Kota IHK.
- Agar melakukan konsumsi secara wajar dengan bijak berbelanja serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui publikasi informasi yang benar mengenai harga dan ketersediaan pangan